

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (PANGKEP) BERDASARKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

RIZKI BAHARI SYAHRUL



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (PANGKEP) BERDASARKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Disusun dan diajukan oleh

RIZKI BAHARI SYAHRUL
A31108863



Kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (PANGKEP) BERDASARKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

disusun dan diajukan oleh

RIZKI BAHARI SYAHRUL
A31108863

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 Desember 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Darwis Said, SE., M.SA. AK.
NIP. 196608221994031009

Darmawati, SE., M.Si. AK.
NIP. 196705181998022001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, SE., M.Si., AK.
NIP. 19650305199203200

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (PANGKEP) BERDASARKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Disusun dan diajukan oleh

RIZKI BAHARI SYAHRUL
A31108863

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **06 Februari 2014** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama penguji	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr. Darwis Said, SE, M.SA, Ak., CA	Ketua	1.
2.	Darmawati, SE, M.Si, Ak., CA	Sekretaris	2.
3.	Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si.	Anggota	3.
4.	Drs. Muh. Achyar Ibrahim, M.Si., Ak., CA	Anggota	4.

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, SE, M.Si, Ak
NIP. 19650305 199203 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizki Bahari Syahrul

NIM : A31108863

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

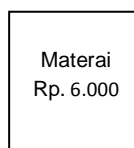
Analisis Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance*

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Februari 2014

Yang membuat pernyataan,



Rizki Bahari Syahrul

PRAKATA

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, termasuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **Analisis Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance***”. Salam dan shalawat dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pencerah yang menuntun ummatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan segala ilmu da ajarannya.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, disamping memberikan pengalaman kepada penulis untuk meneliti dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara materi maupun moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua atas segala pengorbanan, dukungan, arahan, doa, dan kasih sayang yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E, MS, Ak beserta jajarannya terkhusus pada Wakil Dekan I, II, dan III. Serta seluruh dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya selama penulis belajar di kelas.
3. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si.,Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Dr. Darwis Said, SE.,M.SA.,Ak. selaku pembimbing I dan Ibu Darmawati, SE., M.Si, Ak. selaku pembimbing II atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkep dan Bapak Asmar Asaf, SE. selaku *Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkep yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas terutama Pak Aso dan Pak H. Tarru yang membantu penulis selama perkuliahan terima kasih atas segala bantuannya.
7. Muh. Niswar Adhiyatma, SE. dan Ikhsan, SE. yang membantu menyusun dan meminjamkan *print* dalam mencetak skripsi ini, terima kasih atas bantuannya.
8. Teman-teman seperjuangan mulai dari awal perkuliahan, terima kasih atas doa dan semangatnya. Buat Yusuf, SE., Setyadi SE., Rivan SE., Dymitra L, SE., Ince Indra, SE., Andi Baso, SE., Laode Ikramansyah, SE., Chaerul Akbar, SE., Jamaluddin, SE., Natsir, SE., Syahrul, SE., Fauzan A.,SE., dan lain-lain yang tidak sempat penulis cantumkan namanya atas doa dan dorongan selama penulisan skripsi ini serta pengalaman tak terlupakan selama menjalani perkuliahan semoga menjadi kisah klasik untuk masa depan.
9. Saudara dan saudari kandung yang selama ini telah memberikan semangat dan membantu selama masa perkuliahan. Buat Kak dr.Afrida Noor Komalasari, Kak Agustin Dwi Rika Yanti, SH., Bang Ridho Sefrial Syahrul, SE., dan Kak Yennie Andriani, SE. Terima kasih telah mengajarkan dan selalu menuntun hingga akhirnya masa perkuliahan dan skripsi telah selesai dilaksanakan.

10. Keluarga besar KKN UNHAS Gelombang-82 terutama Desa Baroko, Kabupaten Enrekang, tuan rumah Pak Iskandar, teman-teman Posko Induk Desa Baroko yaitu Abdul Aziz Dumpa, Nasruddin, Ebiet, Rusdin, Fitrah, Vero, Umi dan Ibot. Pengalaman bermasyarakat selama 2 bulan memang sangat tidak terlupakan.
11. Toko buku Gramedia atas bantuannya dalam menemukan buku-buku yang dapat digunakan sebagai dasar dan bahan untuk melakukan uji penelitian selama masa pengumpulan data skripsi.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam seluruh proses selama berada di Fakultas Ekonomi UNHAS.

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembaca.

Makassar, 10 Februari 2014

Penulis

Rizki Bahari Syahrul

ABSTRAK

Analisis Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance*

Performance Analysis of PT. Bank Rakyat Indonesia Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Branch Based on the Principles of Good Corporate Governance

Rizki Bahari Syahrul
Darwis Said
Darmawati

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance*. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) sebagai dasar untuk pengambilan informasi mengenai indikator *good corporate governance* (GCG) yang meliputi akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kinerja bank sepenuhnya diperoleh dari penerapan prinsip GCG yang signifikan dan sesuai peraturan yang berlaku. Penerapan GCG yang terstruktur akan menjadi dasar indikasi bahwa kinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila unsur-unsur dalam GCG terlaksana sesuai dengan semestinya. Serta dapat pula meningkatkan kualitas dan pelayanan BRI bagi para nasabah, dewan direksi, kreditur, debitur, lingkungan perusahaan ataupun masyarakat.

Kata kunci: Analisis, kinerja, prinsip *good corporate governance* (GCG), akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan pertanggungjawaban.

This research aims to analyze the performance of PT. Bank Rakyat Indonesia Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) branch based on the principles of good corporate governance. Data used in this research were obtained from questionnaires (primary) as the basic for the retrieval information on indicators of good corporate governance (GCG) which include accountability, transparency, efficiency and responsibility. Results showed that the improved performance of the bank fully acquired significant by application of the principles of good corporate governance and appropriate to regulations. Structured implementation of GCG will be the basic indication that the company's performance can work well if the elements in accordance with the GCG implemented properly. It can also improve the quality and services of BRI to its customers, board of directors, creditors, debtors, company or community environment.

Keywords: Analysis, performance, the principles of good corporate governance (GCG), accountability, transparency, efficiency and responsibility.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis	11
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
1.5 Organisasi/Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
2.1 Tinjauan Teori Umum	13
2.1.1 Konsep Kinerja	13
2.1.2 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	14
2.1.3 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	16
2.1.4 Unsur-unsur <i>Good Corporate Governance</i>	22
2.1.5 Lingkup <i>Good Corporate Governance</i>	24
2.1.6 Manfaat dan Tujuan <i>Good Corporate Governance</i> pada Perusahaan Umum	27

2.1.7 Kekhususan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Bank Umum	27
2.1.8 Manfaat Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Bank Rakyat Indonesia	29
2.1.9 Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Bank Rakyat Indonesia	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Rancangan Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Objek Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	37
4.1 Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia	37
4.1.1 Sejarah Bank Rakyat Indonesia	37
4.1.2 Visi, Misi dan Strategi Bank Rakyat Indonesia	41
4.1.3 Manajemen dan Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia	42
4.1.4 Kegiatan Usaha Bank Rakyat Indonesia	42
BAB V HASIL PENELITIAN	45
5.1 Analisis Data	45
5. 1.1 Penilaian yang Berkaitan dengan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	45
5. 1.1.1 Akuntabilitas	45
5. 1.1.2 Transparansi	47
5. 1.1.3 Pertanggungjawaban	49
5. 1.1.4 Efisiensi	50

BAB VI PENUTUP	54
6.1 Kesimpulan	54
6.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 5.1 Perhitungan Persentase terhadap Akuntabilitas	45
Tabel 5.2 Perhitungan Persentase terhadap Transparansi.....	47
Tabel 5.3 Perhitungan Persentase terhadap Pertanggungjawaban	49
Tabel 5.4 Perhitungan Persentase terhadap Efisiensi	50
Tabel 5.5 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kuesioner	52

DAFTAR LAMPIRAN

xiii

Lampiran	Halaman
01 Biodata	60
02 Kuesioner Penelitian	62
03 Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian suatu negara sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa perbankan berasaskan demokrasi ekonomi memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dengan fungsi tersebut, bank berperanan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional senantiasa bergerak cepat dan disertai tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Peran penting bank dalam menunjang perekonomian negara merupakan salah satu alasan mengapa kinerja keuangan bank harus senantiasa dianalisa untuk mengetahui tingkat kesehatannya. Analisis ini juga penting karena kebutuhan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholder* dan *shareholder*) akan informasi kesehatan bank terkait, karena melalui hasil analisis keuangan ini mereka akan lebih mengetahui posisi perusahaan yang bersangkutan jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam satu kelompok industri yang sama. Sehingga, hasil analisis kinerja keuangan tersebut berguna untuk mendapatkan atau mempertahankan kepercayaan mereka. Selain itu, persaingan antar bank yang semakin ketat harus dibarengi dengan

manajemen yang baik untuk bisa bertahan pada industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup dalam persaingan yang ketat tersebut adalah kinerja (kondisi keuangan) bank yang baik.

Menurut Lusi (2006:67), analisis terhadap kinerja perusahaan pada umumnya dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan, yang mencakup perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan mengevaluasi kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. Selanjutnya, laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu keputusan.

Seperti halnya krisis ekonomi tahun 1997 yang melanda Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara telah memunculkan wacana yang berkaitan dengan permasalahan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). *Good Corporate Governance* menjadi bahasan yang penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang lebih stabil dimasa yang akan datang. Keterpurukan luar biasa yang disebabkan peristiwa tersebut telah membuka mata bangsa ini bahwa salah satu faktor paling fundamental yang menyebabkan krisis itu terjadi tidak lain dikarenakan prinsip-prinsip GCG yang diabaikan.

Beberapa skandal yang terjadi di negara berkembang seperti di Amerika dengan adanya kasus Enron dan Worldcom, maupun di negara sedang berkembang seperti di Indonesia dengan kasus Kimia Farma dan bank Global, kian menambah perhatian para pelaku pasar dan penentu regulasi terhadap isu GCG. Para pelaku dunia usaha dituntut untuk mengubah cara mereka

melakukan dan mengelola bisnis mereka. Ditambah lagi dengan datangnya era globalisasi dimana pasar akan semakin kompetitif, maka perubahan fundamental dalam penerapan *corporate governance* mutlak dilakukan. (Herwidayatmo, 2000:25).

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya *Good Corporate Governance* dan penerapannya di Indonesia telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Upaya-upaya tersebut antara lain pembentukan Komisi Nasional GCG oleh kantor Menko Perekonomian dan disusunnya *National Code of Good Corporate Governance* atau Pedoman Nasional GCG. Lembaga pemeringkat *Corporate Governance* seperti *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dan *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) juga turut mendorong pelaksanaan GCG oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan GCG tersebut belumlah mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono (2003) yang menemukan bahwa GCG belum berhasil diterapkan di Indonesia. Hal menarik lainnya ditemukan oleh Bank Indonesia. Evaluasi Bank Indonesia terhadap 101 bank pada periode September 2007, menemukan bahwa 69,3% bank yang beroperasi di Indonesia belum mematuhi ketentuan GCG (Muchammad Ghufro, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum ada perubahan yang berarti atas pelaksanaan GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk di bidang perbankan.

Pada saat industri perbankan tidak memiliki pertahanan yang kuat dalam menjalankan usahanya, maka risiko-risiko tersebut dapat menyerang sektor perbankan. Jika hal ini semakin memperburuk kondisi perbankan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan akan semakin menurun.

Masyarakat (nasabah) yang menyimpan uang di bank mulai tidak yakin akan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya secara penuh, sehingga semakin banyak nasabah yang menarik uangnya dari bank diakibatkan oleh adanya *moral hazard*, penurunan aset dan terjadinya likuidasi. Krisis kepercayaan yang diikuti oleh penarikan dana secara besar-besaran dari bank oleh nasabah ini disebut sebagai *bank runs*.

Dengan demikian sebagai lembaga keuangan yang berperan penting bagi sistem perekonomian di negara kita, bank dituntut agar mampu mengelola berbagai risiko yang harus dihadapi oleh lembaga perantar keuangan. Jika tidak, maka risiko ini akan memberikan *effect* nya kepada para masyarakat. Tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga keuangan menentukan eksistensi dari lembaga keuangan (bank) tersebut yang akhirnya berpengaruh kepada kelancaran aliran dana dalam sistem perekonomian negara kita.

Usaha untuk mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui reskontruksi dan rekapitulasi dapat berdampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan antara lain: ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *good corporate governance* (GCG), dan pengawasan yang efektif dari otoritas Pengawas Bank yang dilakukan secara signifikan.

Good Corporate Governance sendiri merupakan serangkaian mekanisme yang merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan, termasuk para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajer, Karyawan dan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) lainnya. *Good Corporate Governance* juga menegaskan filosofi bahwa

pengelolaan perusahaan merupakan amanah dari berdirinya perusahaan dan oleh karenanya semua pihak yang terlibat harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan. Pada titik inilah pertanyaan reflektif tentang integritas, tanggung jawab dan independensi patut ditujukan kepada semua pimpinan perusahaan di Indonesia, termasuk sektor perbankan yang sejak semula memang bertopang kepada kepercayaan dan amanah masyarakat.

Krisna Wijaya (2002:48) mengungkapkan bahwa bisnis perbankan memiliki kekhasan dalam pengelolaannya. Alasan utamanya adalah karena adanya unsur 3K yang harus dipatuhi yakni Kepercayaan, Keterbukaan, dan Keberhatian. Fokus utama bank adalah menjaga kepercayaan dan mencegah risiko yang mungkin terjadi. Masyarakat menyimpan dananya di bank semata-mata berdasarkan kepercayaan bahwa dananya akan kembali ditambah sejumlah keuntungan yang berasal dari bunga. Selanjutnya dana tersebut akan diputar menjadi bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit dan pembelian surat berharga. Apabila tidak ditangani secara profesional, transparan dan hati-hati (*prudential banking*) akan menimbulkan risiko dan bencana bagi perbankan.

Tata kelola perbankan nasional memerlukan sistem manajemen perbankan nasional dalam memberikan acuan dan motivasi kepada bankir dalam mengelola usaha perbankan. Untuk itu diperlukan pula pengaturan dan pengawasan bank untuk memastikan bahwa bank dijalankan dengan hati-hati, penuh integritas serta terhindar dari *moral hazard* para pengurusnya. Dengan demikian dunia perbankan dapat tumbuh secara mandiri dan dapat memberikan kontribusi yang berarti dan secara sinergis mampu mencapai kinerja yang optimal dalam mengemban visi dan misi perbankan nasional dalam mendukung sektor ekonomi nasional dan daerah.

Dalam hal ini kinerja perusahaan yang baik merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, karena dari kinerja perusahaan terlihat kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi para karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran (Mulyadi, 2006:5).

Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sektor perbankan, maka pada tahun 2006 Bank Indonesia menggagas peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan GCG di Bank Umum. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam pelaksanaan GCG tersebut, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Keberadaan pihak-pihak independen tersebut diharapkan dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflik of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan

stakeholders khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas khususnya pada prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan serta terdapatnya peningkatan kinerja yang signifikan.

Penerapan *Good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip dasar dari *Good corporate governance* (GCG) pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Seperti yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan salah satu perusahaan *go public* yang bergerak dalam industri perbankan. Sebagai lembaga pembiayaan yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat misalnya dalam usaha mikro kecil dan menengah BRI harus mampu memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja tersebar yang luas di Indonesia dan memiliki sasaran kedepan dalam pengembangan perekonomian masyarakat sebagai langkah awal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

BRI memiliki cabang yang tersebar hampir keseluruhan pelosok nusantara. Kondisi tersebut memberikan peluang kepada pihak BRI untuk ber ekspansi dan juga kepada pihak masyarakat untuk lebih memanfaatkan kesempatan untuk memperluas jaringan usaha. Selain itu, sesuai dengan Misi Bank Rakyat Indonesia yang berhubungan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. BRI harus senantiasa memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui

jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek Good Corporate Governance.

Seperti yang dikutip dari Bangsa BerIndonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kembali berhasil membuktikan keunggulannya dengan memenangkan penghargaan sebagai emiten terbaik di sektor perbankan pada penganugerahan *Investor Award*, Kamis (02/05/12) yang diselenggarakan di *Four Seasons Hotel*, Jakarta.

Dalam hal ini BRI merupakan satu-satunya emiten industri keuangan bank yang berhasil duduk sebagai emiten terbaik 2013. Kinerja yang baik dan kemampuan fundamental yang mengakar, mendorong para juri untuk mengunggulkan BRI untuk maju sebagai satu-satunya pemenang tahun ini. Selain itu, BRI dianggap telah berhasil mengimplementasikan *Good Corporate Governance* yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan yang berkelanjutan perusahaan (*Growth Sustainability*) sehingga mampu mencapai pertumbuhan yang selalu positif.

Dewan Juri juga menilai BRI mampu menerapkan sistem kinerja SDM yang positif dan mampu bersaing melalui pertumbuhan jumlah pekerja, konversi tenaga *outsourche* menjadi kontrak, dan sistem penghargaan kinerja yang sesuai, untuk menjawab tantang industry perbankan yang semakin ketat dan *prudent* serta mengedepankan pelayanan yang prima. Ketua Dewan Juri *Investor Award* 2013, Roy Sembel, mengungkapkan pemeringkatan tahun ini mengangkat tema besar "*Embracing Sustainability*". Tim juri sepakat untuk menggali kemampuan dan pemahaman manajemen emiten untuk mencapai dan mempertahankan pertumbuhan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Kemampuan Perusahaan tersebut terkait dengan implementasi *Good*

Corporate Governance (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang baik” Ungkapnya.

Dengan inilah dilaksanakanlah GCG sesuai PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang perubahan PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, maka BRI (dalam hal ini Dewan Pengawas) membentuk komite-komite yakni Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko. Komite - komite tersebut diharapkan mampu membuat pelaksanaan GCG pada BRI yang sesuai dengan Prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Efisiensi (*Efficient*) dan Tanggung Jawab (*Responsibility*) agar dapat berjalan dengan baik dan dapat pula didukung dengan konsep kinerja yang biasa disebut *CAMEL* yang meliputi aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank. *CAMEL* juga merupakan tolok yang menjadi obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. *CAMEL* terdiri atas lima kriteria yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan likuiditas. Namun fakta yang berjalan di lapangan belumlah dapat memberikan keyakinan bahwa BRI telah melaksanakan GCG secara komprehensif.

Adapun landasan dari penelitian ini juga didukung dengan beberapa penelitian terdahulu yang mungkin bisa bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Maka dari itu penelitian terdahulu yang membahas mengenai *Good Corporate Governance* misalnya: Penelitian yang dilakukan oleh Cisilia Prilestari (2007) dengan judul "Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Pada PT Semen Gresik Tbk.". Menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan penekatan *single case study*. Hasil yang diperoleh Bahwa secara umum Implementasi *Good Corporate Governance* pada Semen Gresik sudah cukup

baik. Walaupun secara khusus ada hal yang perlu diperbaiki seperti dalam hal transparansi, independensi dan belum terintegrasinya sistem manajemen risiko dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugraha (2009), dengan judul "Penerapan GCG pada PDAM Surabaya (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya)", dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah PT PDAM telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* cukup baik. Walaupun belum sempurna. Tetapi PDAM kota Surabaya berusaha lebih baik lagi dengan menerapkan dan melaksanakan *Good Corporate Governance*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah objek penelitian dari kedua penelitian sebelumnya dan juga penelitian saat ini dipusatkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan tanggung jawab Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kinerjanya. Dengan alasan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance***".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penulisan ini adalah apakah penerapan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi dan Tanggung Jawab dalam GCG pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) telah berjalan dengan baik dalam peningkatan kinerja perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi dan Tanggung Jawab dalam GCG pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mengenai peningkatan kinerja perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan kajian pengembangan ilmu mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG pada dunia perbankan sebagai salah satu entitas nasional secara umum dan daerah pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pangkajene dan Kepulauan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan untuk memberikan gambaran susunan keseluruhan dari penelitian ini. Penelitian ini tersaji dalam enam bab, yang tergambar sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Dalam bab ini dibahas tentang masalah yang dihadapi dan tujuan diadakannya penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi berbagai macam pemikiran dan landasan teori yang digunakan dan terkait dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Terdiri dari objek penelitian , tempat penelitian, sumber data penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis perencanaan penerapan. Bab ini memberikan penjelasan secara terperinci mengenai hal-hal yang terkait pelaksanaan penelitian.

BAB IV Gambaran Umum Perusahaan

Menyajikan gambaran atau deskripsi mengenai objek yang diteliti.

BAB V Hasil dan Analisis

Menyajikan tentang analisis data yang diperoleh, dan pembahasan tentang hasil analisis.

BAB VI Penutup

Menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Umum

2.1.1 Konsep Kinerja

Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja. Gilbert (1997) mendefinisikan kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Murphy (1990) menyatakan bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat bekerja. Sedangkan Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Mangkunegara (2000:67), mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.

Menurut Lavasque (2005), kinerja adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang dan hasilnya dalam melaksanakan fungsi suatu pekerjaan. Sama halnya dengan Stephen P. Robbin (2005) yang memaparkan bahwa kinerja adalah jawaban atas pertanyaan “apa hasil yang dicapai seseorang sesudah mengerjakan sesuatu”. Selain itu Schemerson, Hunt dan Osborn mengatakan kinerja adalah kuantitas dan kualitas pencapaian tugas-tugas, baik yang

dilakukan individu, kelompok maupun organisasi. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kinerja di atas, penulis mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan kegiatan seseorang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Dan dapat dipahami bahwa pengertian kinerja tidak terbatas pada kinerja individu saja, tetapi juga kinerja kelompok/tim dan kinerja organisasi, yang pada dasarnya bersumber dari kinerja individu.

2.1.2 Pengertian *Good Corporate Governance*

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

Ada berbagai pengertian *Good Corporate Governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Corporate governance* merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

(OECD dalam Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, 2007:17).

- b. *Corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai

pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

(IICG dalam G. Suprayitno, et al, 2004:18).

- c. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan *stakeholders* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang luas.

(Sutan Remy Sjahdeini, 1999:1).

- d. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum).

Dengan demikian berdasarkan uraian mengenai *corporate governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah

suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

2.1.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam praktik *corporate governance* berbeda disetiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman, atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan *corporate governance* juga akan berbeda (G. Suprayitno, et al, 2000:18). Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan akan mempengaruhi kualitas implementasi *Good Corporate Governance* perusahaan (Deni Darmawati, 2006:2). Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG harus mempertimbangkan karakter setiap perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain sebagainya. (Wilson Arafat, 2008:9).

Prinsip-prinsip mengenai *corporate governance* memiliki banyak versi, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan. Untuk penelitian ini prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang digunakan adalah prinsip-prinsip yang dikenal sebagai “TARIF” (*transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*).

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 bagian penjelasan umum memberikan definisi prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

“*Pertama* transparansi (*transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan serta

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Keempat*, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. *Kelima*, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Sutedi (2011:11), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance*, yaitu :

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

2. *Accountability* (Dapat dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian

setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3. *Fairness* (Kesetaraan)

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

4. *Sustainability* (Kelangsungan)

Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara (*corporation*) *exist* dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*-nya.

Sedangkan menurut KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 pada pasal 3 yang dikutip dari Hery (2010:15), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan;
2. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

3. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia (2004) yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) memaparkan mengenai arti dari kelima prinsip tersebut, yakni:

“Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fainess*)”.

Pedoman tersebut merinci konsepsi dari kelima prinsip GCG, yakni:

1. Keterbukaan (*Transparency*)
 - a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.

- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem dan pelaksanaan GCG serta keterjadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
- d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *reward and punishment system*.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
 - a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
 - b. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. Independensi (*Independency*)
 - a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - b. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fainess*)
 - a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
 - b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Menurut Christian Herdinata (2008:48), prinsip-prinsip GCG memegang peranan penting, antara lain:

1. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya;

2. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaan;
3. Perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsisten, termasuk peraturan dibidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen, dan sebagainya.

Good Corporate Governance akan memberikan empat manfaat besar antara lain meliputi:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value*.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

2.1.4 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2011:41), unsur-unsur dalam GCG yaitu :

a. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :

- 1) Pemegang saham;
- 2) Direksi;

- 3) Dewan komisaris;
- 4) Manajer;
- 5) Karyawan ;
- 6) Sistem remunerasi berdasar kinerja;
- 7) Komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi :

- 1) Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*) yang meliputi pemberian data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, maka tujuan dari pengungkapan (*Disclosure*) tersebut tidak akan tercapai.
- 2) Transparansi yang meliputi pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Akuntabilitas yang meliputi evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.
- 4) Kesetaraan meliputi penyajian data atau informasi yang mengkhhususkan pada sesuatu yang bersifat independen.

- 5) Aturan dari *code of conduct* meliputi adanya etika dan perilaku bisnis yang berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

b. *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah :

- 1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;
- 2) Investor;
- 3) Institusi penyedia informasi;
- 4) Akuntan publik;
- 5) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- 6) Pemberi pinjaman;
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi :

- 1) Aturan dari *code of conduct*;
- 2) Kesetaraan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Jaminan hukum.

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas *Corporate Governance*.

2.1.5 Lingkup *Good Corporate Governance*

OCED (*The Organization for Economic and Development*) memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercipta *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan dalam Sutedi (2011:65), yaitu;

1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam *Corporate Governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hal-hal dasar pemegang saham, yaitu :

- a) Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan;
- b) Hak untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan saham;
- c) Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur;
- d) Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- e) Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi;
- f) Hak untuk memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan.

2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*).

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).

3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*).

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).

4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*).

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (KAP) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*).

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.6 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan secara Umum

Ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*, yaitu :

- 1) GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
- 2) GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
- 3) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- 4) Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
- 5) Mengurangi korupsi.

2.1.7 Kekhususan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum

Secara sepintas nampaknya penerapan GCG di bank umum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidaklah demikian halnya. *Good Corporate Governance* pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan *governance* pada lembaga keuangan non bank. Dalam banyak perilaku manajer dan pemilik bank merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan GCG. Dalam banyak hal

konsep teori keagenan (*agency theory*) yang sering digunakan dalam penerapan GCG tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam industri perbankan.

Ross Levine sebagaimana dikutip oleh Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata (2007:63) menyatakan bahwa bank pada dasarnya mempunyai dua ciri khas yang tidak terdapat pada jenis industri lainnya yaitu:

1) Informasi Asimetri dalam Industri Perbankan

Informasi yang asimetri pada industri perbankan mempunyai dimensi dan kompleksitas yang lebih tinggi dari industri lainnya. Asimetri ini terjadi diantara deposan, manajer bank, pengurus bank, debitor, pemilik/pemegang saham, bank dan regulator. Semakin besar informasi asimetri antara pihak luar bank dan pihak dalam bank, maka akan semakin sulit bagi pihak luar untuk memonitor kinerja *governance* bank. Hal ini menjadi semakin sulit karena deposan dan debitor yang sangat banyak jumlahnya dan tersebar (*diffuse*). Bila jumlah pemegang saham juga banyak dan tersebar, maka kompleksitasnya akan semakin bertambah. Bila terdapat pemegang saham pengendali yang dominan, pengendalian manajemen akan lebih mudah, akan tetapi juga terdapat bahaya adanya *misconduct*, *fraud* atau penyalahgunaan bank dan dana masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok usahanya. Informasi keuangan yang asimetri ini adalah sumber risiko yang tinggi, baik risiko kredit, risiko operasional maupun risiko hukum serta menjadi salah satu sumber utama terjadinya kejahatan perbankan.

2) Peran Regulasi dalam *Corporate Governance* Perbankan

Peran regulator dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui sistem kelembagaan perbankan yang lebih kuat, efisien dan bermanfaat. Aturan *corporate governance* dalam industri umumnya

bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak mencampuri urusan proses *governance* perusahaan tersebut. Dalam industri perbankan regulasi yang ada mempengaruhi proses *governance* bank secara langsung dan merupakan hal yang harus dipatuhi, karena dinyatakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap regulasi tersebut merupakan pelanggaran kepatuhan dan mempunyai ancaman sanksi hukum.

Penerapan GCG perbankan dianggap unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan jenis lain maupun perusahaan non keuangan. Keunikan perbankan terutama dilihat dari neraca yaitu aset perbankan rata-rata adalah kredit yang sebagian besar bersifat jangka panjang, sedangkan sisi liabilities adalah tabungan dan deposito yang memiliki sifat jangka pendek. Pengelolaan yang tidak hati-hati akan menyebabkan terjadinya *mismatch* antara aktiva dan pasiva. Terjadinya *mismatch* dapat menyebabkan pembukuan negatif bagi bank. Penyaluran kredit kepada pihak terkait dapat bersifat positif jika keterkaitan itu meminimkan risiko dan sebaliknya akan bersifat negatif jika justru menambah risiko gagal bayar akibat terjadinya *moral hazard*. Bagaimanapun, GCG menjadi kental ketika ada persinggungan kepentingan antara pemilik dan manajemen.

2.1.8 Manfaat Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Bank Rakyat Indonesia

PT Bank Rakyat Indonesia percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat baik bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya dengan:

- 1) Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.
- 2) Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 3) Mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *shareholder's values*.
- 4) Meningkatnya minat dan kepercayaan investor.
- 5) Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
- 6) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.

2.1.9 Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* PT Bank Rakyat Indonesia

Tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan norma ataupun pedoman korporasi yang digunakan dalam pengelolaan perusahaan yang sehat. PT Bank Rakyat Indonesia menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Keterbukaan (Transparency)

- a. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- b. Informasi tersebut meliputi visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.

- c. Prinsip keterbukaan itu tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan. PT Bank Rakyat Indonesia menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, serta mengumumkan kepada publik mengenai terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga atau nilai efek atau keputusan investasi pemodal secara tepat waktu dan obyektif berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. PBI No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum beserta perubahannya PBI No.8/4/PBI/2006 tentang perubahan PBI No.8/4/PBI/2006 mewajibkan PT Bank Rakyat Indonesia untuk melaporkan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahunnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Bank dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing.
- b. Dalam pengelolaannya, Bank menetapkan *check and balance system*.
- c. Bank juga memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate*

values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *reward and punishment system*.

- d. Bank meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GGC.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

- a. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Bank sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4. Independensi (*Independency*)

- a. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- b. Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

- a. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- b. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkep yang berlokasi di Jl. Kemakmuran No. 74, Pangkejene dan Kepulauan (Pangkep).

3.3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini meliputi karyawan dan pimpinan yang bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan serta beberapa nasabah ataupun debitor yang kiranya dapat menunjang berjalannya penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria penentuan sampel yang dimaksud ialah responden merupakan pihak-pihak yang memahami penerapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan

sebagai dasar peningkatan kinerja perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Dan jumlah kuesioner yang dibagikan adalah sebanyak 30 lembar kepada 30 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data objektif, yaitu data yang dapat diobservasi dan diukur, dapat diperoleh menggunakan sikap yang lebih pasti, bisa diyakini keabsahannya, tapi bisa juga melibatkan perkiraan dan asumsi serta dengan didukung dengan fakta/data. Sikap objektif adalah sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang ada dalam penelitian ini berasal dari jawaban kuisisioner responden. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil dokumentasi yang telah dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan seperti Struktur Organisasi dan Laporan Tahunan (*annual report*), yang juga dapat diakses pada situs <http://www.bri.co.id/>

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode survey. Sedangkan teknik komunikasi yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah kuesioner. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengantar langsung kuesioner kepada responden.

Adapun jadwal yang ditentukan dalam melakukan penelitian ini pada hari jam kantor yaitu senin sampai jumat selama beberapa hari agar mengumpulkan kuesioner lebih akurat. Jumlah orang yang terjun langsung dalam melakukan penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan kerja sama dengan responden.

3.6 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, informasi dan data.

Jadi data hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis oleh penulis untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* merupakan alat pertanggungjawaban pada PT Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan, dikumpulkan melalui penelitian atas hasil kuesioner dengan menggunakan perhitungan persentase.

Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan rumus **Dean J. Champion** dalam Violetta (2011:44) , yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban “YA” kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jawaban "YA"}}{\sum \text{Jumlah Kuesioner} \times \text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100\%$$

Keterangan :

\sum Jawaban YA : seluruh penjumlahan jawaban YA yang di jawab oleh responden dalam kuesioner.

\sum Jumlah Kuesioner : seluruh penjumlahan kuesioner yang beredar yang wajib diisi oleh para responden

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Jumlah Pertanyaan : Pertanyaan yang ada dalam kuesioner berdasarkan klasifikasinya masing-masing.

Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis, dapat diklasifikasikan secara umum, yaitu Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan “Perwujudan dari *Good Corporate Governance* yang ditinjau dari Prinsip *Accountability*, Prinsip *Transparency*, Prinsip *Efficiency* dan Prinsip *Responsibility*” adalah sebagai berikut:

Persentase	Kriteria
0% - 25%	<i>Good Corporate Governance</i> Kurang
26% - 50 %	<i>Good Corporate Governance</i> Sedang
51% - 75%	<i>Good Corporate Governance</i> Baik
76% - 100%	<i>Good Corporate Governance</i> Sangat Baik

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia

4.1.1 Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI. Proses kelahiran Bank BRI dibidani oleh seorang Patih Banyumas yang bernama Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Dengan bantuan Asisten Residen Banyumas, E. Sieburgh, kemudian didirikan sebuah bank dengan nama "*De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*" atau bank bantuan dan simpanan milik pegawai pangreh praja berkebangsaan pribumi (Indonesia).

Pada tahun 1897 namanya diubah menjadi "*Purwokertosche Hulp, Spaar en Landbouw Credietbank*" oleh asisten Residen Banyumas baru yang bernama W.P.D. De Wolff Van Westerrode seiring dengan reorganisasi yang meliputi: pembentukan badan hukum, penyusutan prosedur, perluasan keanggotaan, perluasan bidang usaha dan lain-lain.

Pada tahun 1898 namanya lebih dikenal sebagai *Volksbank* atau "Bank Rakyat" yang tumbuh dengan pesat di berbagai tempat sehingga mulai melibatkan pemerintahan Hindia Belanda secara langsung dan namanya berganti lagi menjadi *Volkscredietwezen*.

Pada tahun 1934 didirikan *Algemeene Volkscredietbank* (AVB) untuk mempersatukan banyak *Volksbank* yang mengalami kesulitan, atau semacam *merger* di masa sekarang. Secara resmi AVB didirikan pada tanggal 19 Februari 1934 yang dituangkan dalam berita negara No. 82 tentang *Bepalingen*

Betreffende De Algemeene Volkscredietbank. Dalam *Staatsblad* tersebut ditegaskan bahwa AVB bukanlah usaha yang dimiliki oleh Negara (*landsbedrijf*), meskipun didirikan dengan keputusan pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat memberi pengaruh secara langsung, tetapi memberi kebebasan secukupnya. Dengan demikian, AVB diusahakan untuk diatur dan dikelola sebagaimana perusahaan swasta. Memasuki masa kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengambil alih berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 1946, dimana salah satu pasal dalam PP ini menyebutkan bahwa Bank BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia.

Pada tahun 1948, kegiatan usaha sempat terhenti untuk sementara waktu mengingat berkecamuknya perang kemerdekaan. Setelah penandatanganan Perjanjian Renville pada tahun 1949, aktif kembali dengan nama baru “Bank Rakyat Indonesia Serikat”.

Pada tanggal 25 September 1956, status meningkat menjadi bank devisa, berdasarkan Surat Dewan Moneter No. SEKR/BANK BRI/328, tanggal 25 September 1956. Dengan status sebagai bank devisa yang didukung jaringan kantor cabang di banyak kota di Indonesia, dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada nasabah yang bergerak di bidang perdagangan luar negeri dan kegiatan *international banking*.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 41 tentang pembentukan Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan tiga buah bank, yaitu Bank BRI, Bank Tani dan Nelayan (BTN), serta *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM). Tujuan pembentukan BKTN ini untuk dapat memberikan dukungan pada pelaksanaan revolusi di bidang agraria

yang dicetuskan pada tanggal 24 September 1960 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Pada tahun 1965, terjadi perubahan struktur kelembagaan secara cepat pada bank-bank milik pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden (Penpres) No. 8 tahun 1965, Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara (BTN) diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia (BI), kecuali Bank Dagang Negara (BDN). Sejalan dengan itu, berdasarkan Penpres No. 9 tanggal 4 juni 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia (BI) dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (BIUKTN).

Setelah berjalan selama satu bulan, pemerintah mengeluarkan Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (sebelumnya BIUKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang ekspor impor.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang pokok perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang bank sentral, Bank Indonesia dikembalikan fungsinya sebagai bank sentral, dan Bank Negara Indonesia unit II bidang rural dan ekspor impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank yaitu Bank BRI dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 1968, tugas-tugas pokok Bank BRI sebagai bank umum ditetapkan kembali.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Bank BRI berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan kepemilikannya masih 100 persen di tangan pemerintah.

Perubahan menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut dituangkan dalam akta pendirian No. 113 tanggal 31 Juli tahun 1992, yang dibuat dihadapan Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 1992 dalam Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.TH.92 dan telah didaftarkan dalam buku register pada kantor pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 2155/1992 pada tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 73, tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992.

Pada tanggal 3 Oktober 2003 berdasarkan akta No. 6 tanggal 3 Oktober 2003 status Bank BRI berubah menjadi perusahaan Perseroan Terbatas Terbuka, sehingga untuk selanjutnya "PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)" berubah menjadi "PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk". Bank BRI memperoleh izin untuk melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*) sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam surat No. P.001/4690/DPRRI/2003 tanggal 8 September 2003 mengenai persetujuan tentang rencana penawaran umum perdana Bank BRI, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 tahun 2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang penjualan saham pada perusahaan perseroan Bank BRI. Bank BRI melakukan pencatatan perdana sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada tanggal 10 November 2003. Januari 2004, Bank BRI telah melakukan penawaran umum obligasi subordinasi I.

Kegiatan Bank BRI didasarkan pada bisnis yang berfokus pada golongan masyarakat kecil, fokus ini masih konsisten sampai saat ini dimana Bank BRI bergerak dalam pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Komitmen ini tercermin dari besarnya komposisi pinjaman yang disalurkan

kepada pengusaha kecil, ritel dan menengah. Fokus bisnis ini dituangkan dalam *Business Plan* Bank BRI 2000-2003, dimana minimal 80 persen dari total portofolio kredit Bank BRI ditujukan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

4.1.2 Visi, Misi, dan Strategi Bank Rakyat Indonesia

Visi Bank BRI

“Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah”.

Misi Bank BRI

Visi Bank BRI kemudian dijabarkan dalam tiga misi perusahaan, yaitu:

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menunjang perekonomian masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melakukan praktek *good corporate governance*.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Strategi Bank BRI

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, strategi jangka panjang yang hendak diterapkan adalah mengembangkan dan meningkatkan usaha yang bersinergi dengan fokus pada bisnis mikro, ritel dan menengah melalui jaringan luas yang didukung oleh teknologi informasi mutakhir dan sumber daya manusia profesional serta melaksanakan praktek *risk management* dan *good corporate governance*.

4.1.3 Manajemen dan Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia

Salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia adalah Bank BRI. Kantor Pusat Bank BRI berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Kavling 44-46 Jakarta 10210, Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan usaha Bank BRI yang semakin pesat, data per September 2004 memperlihatkan Bank BRI mempunyai unit kerja yang terdiri dari 1 kantor pusat, 13 kantor wilayah, 325 kantor cabang (dalam negeri), 163 kantor cabang pembantu, 16 cabang bank syariah, 1 kantor cabang khusus, 1 kantor New York *Agency*, 1 kantor cabang *Cayman Island*, 1 kantor perwakilan Hongkong, 4.046 Bank BRI unit dan 140 pos pelayanan desa dengan jumlah pegawai mencapai 36.715 orang.

Terkait dengan usahanya, Bank BRI membagi manajemen perusahaannya menjadi beberapa bagian, yaitu: (1) Bisnis mikro dan ritel, (2) Bisnis menengah, (3) Pengendalian kredit, (4) Keuangan dan *international*, (5) Operasional, dan (6) Kepatuhan.

4.1.4 Kegiatan Usaha Bank Rakyat Indonesia

Bank BRI menjalankan usahanya melalui divisi-divisi bisnis mikro, bisnis ritel, bisnis umum, unit bisnis syariah serta divisi *treasury* dan internasional. Fokus bisnis yang mengarah pada pemberdayaan usaha mikro telah menjadi basis yang kuat yang menempatkan Bank BRI sebagai bank terbesar ke dua dari sisi penyaluran kredit.

Bank BRI melayani nasabah mikro melalui jaringan unit yang diperpanjang dengan Pos Pelayanan Desa (PPD). Jaringan bisnis yang dibangun Bank BRI merupakan unsur pendukung utama sehingga Bank BRI dapat menguasai segmen ini. Produk yang dikelola oleh divisi ini adalah produk pinjaman dan produk simpanan. Produk pinjaman yang ditawarkan berupa

Kupede Modal Kerja dan Kupedes Investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro dan pelaku usaha lainnya serta Kupedes untuk golongan berpenghasilan tetap yang diberikan untuk pekerja perusahaan swasta, lembaga-lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama pegawai negeri sipil dan pensiunan. Produk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito berjangka (termasuk sertifikat deposito).

Bisnis ritel dilaksanakan melalui kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Divisi ritel menyediakan kredit untuk perusahaan kecil dan menengah (UKM), termasuk perusahaan swasta dan perusahaan perorangan. Produk pinjaman yang diberikan adalah kredit modal kerja dan kredit investasi yang diberikan kepada UKM, serta kredit *Golbertap* yang diberikan kepada perorangan yang bekerja pada perusahaan swasta, BUMN, dan Institusi Pemerintah. Produk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka dan sertifikat deposito yang dikelola divisi *consumer banking*. Produk lain yang ditawarkan adalah *Letter of Credit* (L/C), bank garansi, produk-produk *treasury* dan reksa dana melalui *relationship manager*.

Bisnis menengah meliputi komersial, kredit korporasi dan agribisnis. Kredit komersial diberikan kepada nasabah dalam jumlah lima miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Kredit korporasi merupakan fasilitas kredit diatas 50 miliar rupiah, sedangkan kredit agribisnis diberikan kepada debitur yang bergerak dalam industri agribisnis.

Bidang usaha *consumer banking* menawarkan kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah dan kredit talangan haji. Produk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Produk lain yang ditawarkan adalah kartu debit, kartu kredit, jasa pembayaran tagihan, jasa pengiriman dana dan *safe deposit box*.

Produk pendanaan yang ditawarkan Bank BRI antara lain berupa tabungan, giro, deposito berjangka dan sertifikat deposito yang diberikan kepada nasabah mikro, ritel, UKM, BUMN dan pemerintah.

Produk pendanaan berupa Simpedes, Simaskot, Britama Rupiah, Britama Dollar, Giro dan Deposito Berjangka. Simpedes merupakan tabungan yang ditawarkan melalui Bank BRI unit, ditawarkan kepada nasabah yang menginginkan tabungan yang aman dan nyaman. Simaskot ditawarkan melalui Bank BRI unit yang terletak di kota. Britama Rupiah ditawarkan melalui kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Britama Dollar merupakan produk tabungan dalam mata uang asing yaitu Dollar AS.

BAB V

HASIL PENELITIAN

Data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan yang berlokasi di Jl. Kemakmuran No. 74, Pangkejene dan Kepulauan (Pangkep). Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan kurang lebih satu minggu dengan melakukan dua kali pengambilan data penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang “Analisis Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan *Prinsip Good Corporate Governance*” yaitu dari tanggal 27 dan 30 September 2013. Dari 30 kuesioner yang disebarkan terdapat 25 yang diterima kembali dan tidak terdapat kecacatan, maka diperoleh informasi dari hasil kuesioner sebagai berikut:

5.1 Analisis Data

5.1.1 Penilaian yang Berkaitan dengan Perwujudan *Good Corporate Governance* (GCG)

5.1.1.1 Akuntabilitas (*Accountability*)

Tabel 5.1

**Perhitungan persentase terhadap Akuntabilitas
berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	23	2	-	25
2	19	6	-	25

3	20	3	2	25
4	19	2	4	25
5	25	-	-	25
6	24	-	1	25
Jumlah	130	13	7	150

Sumber : Data diolah oleh penulis

$$\% \text{ Akuntabilitas} = \frac{130}{25 \times 6} \times 100 = 86,7\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 86,7% yang meliputi perhitungan setiap bagian atau departemen pada bank yaitu bagian AO Komersial sebesar 18%, Petugas ADK sebanyak 13,33%, Supervisor Pel.Kas sebanyak 23,33%, Pimpinan cabang beserta asisten bisnis sebesar 14,67% dan bagian pendukung lainnya beserta nasabah ataupun debitor sebesar 17,33%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip akuntabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sudah berjalan sangat baik.

Pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), prinsip akuntabilitas ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris, dewan direksi, pimpinan cabang dan segenap karyawan beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan

perusahaan. Pimpinan cabang dan segenap karyawan bertanggung jawab atas peningkatan kinerja dengan menciptakan pelayanan yang maksimal dan memberikan pemahaman yang baik agar nasabah ataupun calon nasabah dapat mempercayakan modalnya disimpan dalam bank.

5.1.1.2 Tranparansi (*Transparency*)

Tabel 4.2

**Perhitungan persentase terhadap Transparansi
berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	21	3	1	25
2	25	-	-	25
3	18	3	4	25
4	22	3	-	25
Jumlah	86	9	5	100

$$\% \text{ Transparansi} = \frac{86}{25 \times 4} \times 100 = 86\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 86% yang meliputi perhitungan setiap bagian atau departemen pada bank yaitu bagian AO Komersial sebesar 17%, Petugas ADK sebanyak 15%, Supervisor Pel.Kas sebanyak 23%, Pimpinan cabang beserta asisten bisnis sebesar 15% dan bagian pendukung lainnya beserta nasabah ataupun debitor sebesar 16%,, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip transparansi pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sudah berjalan sangat baik.

Wujud nyata prinsip transparansi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) adalah sikap terbuka dan bertanggungjawab terhadap pihak-pihak internal yang terkait dan juga masyarakat sekitar sebagai nasabah. Hal ini juga dilakukan dengan memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang menghambat masuknya debitur ataupun pihak eksternal yang ingin menanamkan modalnya, memberi kesempatan kepada masyarakat selaku nasabah dan pihak internal maupun eksternal untuk dapat berperan serta dalam proses penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan peningkatan kinerja perusahaan yang baik. Prinsip transparansi ini tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, adapun wujud nyata transparansi lainnya adalah:

1. Keterbukaan dalam hal rapat-rapat.
2. Keterbukaan Informasi
3. Keterbukaan prosedur.
4. Keterbukaan register.
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat

5.1.1.3 Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Tabel 5.3

**Perhitungan persentase terhadap Pertanggungjawaban
berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	19	5	1	25
2	25	-	-	25
3	25	-	-	25
4	23	2	-	25
5	22	2	1	25
Jumlah	114	9	2	125

Sumber : Data diolah oleh penulis

$$\% \text{ Pertanggungjawaban} = \frac{114}{25 \times 5} \times 100 = 91,2\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 91,2% yang meliputi perhitungan setiap bagian atau departemen pada bank yaitu bagian AO Komersial sebesar 18,4%, Petugas ADK sebanyak 15,2%, Supervisor Pel.Kas sebanyak 24%, Pimpinan cabang beserta asisten bisnis sebesar 15,2% dan bagian pendukung lainnya beserta nasabah ataupun debitor sebesar 18,4%,, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip pertanggungjawaban pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sudah berjalan sangat baik.

Pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), prinsip pertanggungjawaban ini menuntut perusahaan maupun

pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan. Selain itu yang juga menjadi dasar dari pertanggungjawaban ini adalah perusahaan memberikan kontribusi yang baik bagi wilayah atau daerah sekitar dalam rangka menjalankan perusahaan yang baik dengan tanggung jawab baik dari segi lingkungan maupun sumber daya daerah disekitarnya.

5.1.1.4 Efisiensi (*Efficiency*)

Tabel 5.4

**Perhitungan persentase terhadap Efisiensi
berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	18	2	5	25
2	22	3	-	25
3	24	1	-	25
4	17	6	2	25
Jumlah	81	12	7	100

Sumber : Data diolah oleh penulis

$$\% \text{ Efisiensi} = \frac{81}{100} \times 100 = 81\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 81% yang meliputi perhitungan setiap bagian atau departemen pada bank yaitu bagian AO Komersial sebesar 17%, Petugas ADK sebanyak 14%, Supervisor Pel.Kas sebanyak 20%, Pimpinan cabang beserta asisten bisnis sebesar 14% dan bagian pendukung lainnya beserta nasabah ataupun debitor sebesar 16%,, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip efisiensi pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sudah berjalan sangat baik.

Pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), prinsip efisiensi menuntut adanya tindakan oleh perusahaan agar dapat memanfaatkan dengan baik sumber daya yang tersedia dengan skala ekonomi tersedia sedemikian rupa sehingga suatu tingkat output yang hasilnya yang diharapkan dengan biaya yang lebih rendah dari yang lainnya. Peningkatan efisiensi terjadi bila output yang ada atau tingkat output dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah. Dalam hal ini juga tercapainya efisiensi pada bank dapat dilihat dari dengan memperhatikan pertumbuhan tingkat indikator kinerja bank seperti jumlah simpanan, pembiayaan, dan total aktiva.

Tabel 5.5

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kuesioner

No. Tabel	Nama Tabel	Persentase (%)	Kriteria
5.1	Akuntabilitas	86,7	Sangat Baik
5.2	Transparansi	86	Sangat Baik
5.3	Pertanggungjawaban	91,2	Sangat Baik
5.4	Efisiensi	81	Sangat Baik

Sumber: hasil perhitungan kuesioner

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner mengenai penilaian yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* sebagai alat pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja yang baik pada Penerapan prinsip akuntabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Penilaian yang berkaitan dengan perwujudan peningkatan kinerja berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.

1. Penerapan prinsip akuntabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sangat baik dengan tingkat persentase 86,7% karena laporan yang disampaikan memiliki kejelasan fungsi dalam pelaksanaannya.
2. Penerapan prinsip transparansi pada Penerapan prinsip akuntabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sangat baik dengan tingkat persentase 86%. Laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang

saham menggambarkan tujuan perusahaan, kepemilikan saham, serta nama-nama direksi.

3. Penerapan prinsip pertanggungjawaban pada Penerapan prinsip akuntabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sangat baik dengan tingkat persentase 91,2%. Para karyawan Penerapan prinsip akuntabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sangat sadar bahwa pertanggungjawaban lahir karena adanya wewenang, sehingga mereka sangat bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan.
4. Penerapan prinsip efisiensi Penerapan prinsip akuntabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sangat baik dengan tingkat persentase 81%. Dalam hal ini efisiensi tercipta karena adanya pemanfaatan sumber daya yang baik dari perusahaan, mulai dari proses perencanaan akan input yang sesuai dengan menghasilkan output yang maksimal serta adanya juga pertumbuhan yang signifikan baik dalam simpanan, pembiayaan, total aktiva, dan kepercayaan yang besar dari para nasabah terhadap pelayanan yang baik.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa peningkatan kinerja berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), sudah terwujud dengan sangat baik, maka itulah kesimpulan ini diambil berdasarkan hal-hal berikut:

- 1) Peningkatan kinerja berdasarkan prinsip akuntabilitas meliputi adanya kordinasi antara tugas serta fungsi staf dan karyawan yang berjalan dengan efektif, laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang saham disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan adanya pengelolaan perusahaan didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara para pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengoperasian perusahaan.
- 2) Peningkatan kinerja berdasarkan prinsip transparansi meliputi pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan yang dilakukan secara terbuka pada pihak-pihak internal perusahaan dan adanya penyediaan informasi yang memadai, akurat serta tepat waktu kepada para pemegang kepentingan yang berkaitan.
- 3) Peningkatan kinerja berdasarkan prinsip pertanggungjawaban meliputi adanya pertanggungjawban perusahaan kepada negara

agar perusahaan dapat bertahan dalam kegiatan bisnis dengan membayar pajak tepat waktu dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

- 4) Peningkatan kinerja berdasarkan prinsip efisiensi meliputi adanya rasio biaya yang rendah serta pendapatan operasi yang berjalan sesuai dengan standar dan terciptanya efisiensi kinerja ini merupakan perencanaan yang matang dari pihak-pihak internal perusahaan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian atas peningkatan kinerja berdasarkan peranan *Good Corporate Governance* sebagai alat pertanggungjawaban pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan:

- 1) Untuk terus meningkatkan kinerja baik dari segi internal maupun eksternal perusahaan, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) haruslah tetap mempertahankan peranan dalam memaksimalkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
- 2) Peningkatan kinerja yang baik oleh perusahaan perbankan seperti halnya PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dapat dilihat dari pelayanan yang baik kepada para nasabah, calon investor serta memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi para pemegang saham dengan terus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sesuai

dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan pertanggungjawaban.

- 3) Dengan adanya salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yaitu Prinsip Pertanggungjawaban, maka dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) lebih bisa meningkatkan kembali tanggung jawabnya kepada lingkungan, sosial dan tetap menaati peraturan yang berlaku seperti pembayaran pajak tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, M.SI, 2005, *Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Ayu, Riza Putri. 2013. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Prosedur Pemberian Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Alahan Panjang*. Padang: Jurusan Akuntansi UPI "YPTK"..
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. (online), (www.bi.go.id, diakses pada 15 Agustus 2013).
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. (online), (www.bi.go.id, diakses pada 15 Agustus 2013).
- Budiharti, Lusi. 2006. Analisis Kinerja Keuangan Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk 2004 – 2005. Bogor: Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogoro
- Champion, Dean J. 1990. *Basic Statistics for Social research*, 2nd edition, New York: Mac Milan Publishing Co. www.googlebooks.com. Diakses tanggal 25 Maret 2013
- Herdinata, Christian. 2008. Good Corporate Governance Vs Bad Corporate Governance: Pemenuhan Kepentingan antara Para Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas.
- Darmawati, Deni. 2006. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang 23-26 Agustus 2006.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2012. Pedoman Penulisan Skripsi. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Herwidayatmo. 2000. Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia. (Online), (<http://www.imfeui.com/uploads/file110-XXIX-Oktober-2000.PDF>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2013).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Wijaya, Krisna. 2002. Reformasi Perbankan Nasional. Jakarta: Harian Kompas.

Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata. 2007. *Good Corporate Governance pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya*. Jakarta: PT Hikayat Dunia.

Ghufron, Muchammad. 2008. 69,3% Bank Tak Patuhi GCG. (Online), (<http://www.jurnalnasional.com/?med=koran%20Harian&sec=Sembilan&brk=&id=37886&posdate=2008-02-28&detail=Sembilan>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2013)

Mulyadi, 2005. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

—————, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.

Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono. 2003. *Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?* (Online) (<http://researchengines.com/hsulistyanto3.html>, diakses pada tanggal 15 Juli 2013)

Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance. Jakarta : Sinar Grafika*

Tadikapury ,Violetta Jingga. 2011. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Pt Bank X Tbk Kanwil X*. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin.

www.bri.co.id

LAMPIRAN 1

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Rizki Bahari Syahrul
Tempat, Tanggal Lahir : Meral Karimun (Riau), 04 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Perum. Citra Garden Blok A1/02
Telepon Rumah dan HP : 081342926415
Alamat *E-mail* : ribaz20@yahoo.co.id
ribazkhurosakizone@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
 1. SDN Senter 02 Palu
 2. SLTP 01 Pare-pare
 3. SMA Neg. 1 Makassar
 4. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Pendidikan Nonformal
 1. Kursus Bahasa Inggris
 2. Kursus Musik
 3. Seminar Dan *Workshop* Akuntansi

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik : -
Prestasi Nonakademik : -

Pengalaman

Organisasi: Sekdes KKN Desa Baroko Kecamatan Baroko

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 2013

Rizki Bahari Syahrul

LAMPIRAN 2

KUESIONER PENELITIAN

**Analisis Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkep berdasarkan
Prinsip *Good Corporate Governance***

, 2013

Perihal : Permohonan untuk mengisi kuesioner

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada Universitas Hasanuddin, saya bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Analisis kinerja PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkep berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan *Good Corporate Governance* merupakan alat pertanggungjawaban dari kinerja perusahaan, saya sangat mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian saya ini.

Saya berterima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu /Saudara(i) untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner ini. Adapun kuesioner digunakan untuk kepentingan akademis serta akan di jaga kerahasiaannya. Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara(i) saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Rizki Bahari Syahrul

A31108863

DAFTAR PERTANYAAN

A. Data Responden

Isilah pada tempat yang telah disediakan dengan singkat dan jelas, jika Bapak/Ibu keberatan untuk mencantumkan nama, pertanyaan nomor 1 (satu) boleh dikosongkan. Untuk pertanyaan nomor 2 (dua) dan 4 (empat) berilah tanda checklist (✓) pada kotak yang Bapak/Ibu anggap benar.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin ☐ Laki-laki
☐ Perempuan
3. Usia :
4. Pendidikan ☐ SMU
☐ Sarjana / S1
☐ Master / S2
☐ Doktor / S3
5. Jabatan :
6. Lama Bekerja :

B. Pertanyaan Khusus

Bentuk ini adalah pertanyaan mengenai *Good Corporate Governance* sebagai Pilar Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan Bapak/Ibu bekerja.

Daftar Kuesioner

Perwujudan dari *Good Corporate Governance*

Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda “√” pada setiap pertanyaan meliputi Ya, Ragu-Ragu dan Tidak. Kuesioner merupakan kuesioner replikasi dalam Violetta (2011:44)

1.1 Akuntabilitas (*Accountability*)

No	Pertanyaan	Ya	Ragu-ragu	Tidak
1.1.1	Apakah anggota dewan (Komisaris dan Direksi) bertindak dengan berdasarkan informasi yang lengkap, itikad baik, dan kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan pemegang saham?			
1.1.2	Apakah keputusan dewan akan mempengaruhi pemegang saham?			
1.1.3	Apakah dewan memperlakukan semua pemegang saham secara layak?			
1.1.4	Apakah dewan memastikan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan <i>stakeholder</i> ?			
1.1.5	Apakah tugas dan fungsi staff dan karyawan sudah berjalan dengan semestinya dengan adanya penerpan GCG?			
1.1.6	Apakah bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan?			

1.2 Transparansi (*Transparency*)

No	Pertanyaan	Ya	Ragu-ragu	Tidak
1.2.1	Apakah pengambilan keputusan oleh manajemen dilakukan secara terbuka dan			

	dikhususkan pada pihak-pihak internal yang terkait?			
1.2.2	Apakah tujuan perusahaan ditetapkan dengan jelas?			
1.2.3	Apakah pelaksanaan tindak lanjut berupa : a. Penyempurnaan ketatalaksanaan? b. Penyempurnaan program audit? c. Penyerahan khusus pada instansi berwenang?			
1.2.4	Apakah penyebaran dan pengungkapan informasi yang material dilakukan tepat waktu dan efisien?			

1.3 Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

No	Pertanyaan	Ya	Ragu-ragu	Tidak
1.3.1	Apakah hak <i>stakeholders</i> yang dilindungi hukum itu dihargai?			
1.3.2	Apakah perusahaan membayar pajak tepat waktu?			
1.3.3	Apakah lingkungan disekitar perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan?			
1.3.4	Apakah tanggung jawab tersebut merupakan hal yang sangat penting?			
1.3.5	Apakah dengan adanya tanggung jawab perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik dari segi sektor internal maupun internal?			

1.4 Efisiensi (*Efficiency*)

No	Pertanyaan	Ya	Ragu-ragu	Tidak
1.4.1	Apakah dengan adanya efisiensi perusahaan dapat memanfaatkan dengan baik sumber daya yang tersedia dengan skala ekonomi yang			

	tersedia pula?			
1.4.2	Apakah dikatakan efisiensi apabila rasio biaya operasi dibandingkan pendapatan operasi (BOPO) sudah sesuai standar dan tidak tinggi?			
1.4.3	Apakah efisiensi juga dapat dilihat dengan memperhatikan pertumbuhan tingkat indikator kinerja bank seperti jumlah simpanan, pembiayaan, dan total aktiva?			
1.4.4	Apakah tercapainya suatu sistem kinerja didasarkan oleh arahan dari para pemimpin yang telah melakukan perencanaan kerja?			

LAMPIRAN 3

Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene dan Kepulauan

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. PANGKEP

